

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berkembang, yang memiliki ciri – ciri negara berkembang yang seperti tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tingkat pengangguran yang tinggi, jumlah produktivitas yang rendah. Simon Kuznets dalam Sukirno, mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai suatu peningkatan bagi suatu negara untuk menyediakan barang dan jasa bagi penduduknya. Pertumbuhan tersebut disebabkan oleh kemajuan teknologi (Sukirno, 1995). Pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi pengangguran dan terciptanya lapangan pekerjaan yang baru.

Salah satu penyebab pengangguran adalah pertambahan jumlah penduduk membawa dampak pada peningkatan angkatan kerja. Angkatan kerja yang tumbuh lebih cepat daripada kesempatan kerja akan menimbulkan masalah pengangguran yang lebih besar juga. Masalah tersebut merupakan salah satu permasalahan utama yang menjadi fokus bagi pengambilan kebijakan ekonomi makro baik pemerintah pusat maupun daerah. Pada level daerah, pemerintah telah membuat kebijakan ekonomi untuk mengatasi masalah pengangguran dengan penyerapan tenaga kerja di daerah.

Secara umum kondisi ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya dalam 8 tahun terakhir (2006 – 2013) menunjukkan perkembangan yang masih menjadi permasalahan pokok yang di hadapi oleh Indonesia. Sebagai contoh ketidakseimbangan antara percepatan pertumbuhan jumlah angkatan kerja dengan pertumbuhan jumlah kesempatan kerja yang tersedia menyebabkan pengangguran. Proses penyerapan tenaga kerja melalui peningkatan output memerlukan waktu. Namun dengan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi pencari kerja yang masih tinggi serta tekanan ekonomi yang semakin berat, ternyata penciptaan lapangan pekerjaan yang baru belum mampu mengatasi masalah pengangguran yang semakin besar juga. Dengan memberikan dukungan kepada pengusaha daerah untuk membuka pasar yang lebih luas dan pada sisi pemerintahan juga melakukan perlindungan terhadap tenaga kerja dengan memberikan upah minimum agar hal tersebut dapat memberikan jaminan tenaga kerja untuk mendapatkan upah yang layak.

Sejak akhir tahun 1980an tingkat upah minimum sudah mengalami kenaikan dengan cepat sehingga telah mencapai satu titik dimana upah minimum menjadi tingkat upah yang berlaku bagi sebagian besar pekerja. Mengingat besarnya jumlah penduduk serta laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Kondisi yang demikian akan menjadi masalah kalau tidak didukung oleh kekuatan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk penyediaan kesempatan kerja (Simanjuntak, 1985).

Sebelum krisis, Indonesia cukup sukses dalam memenuhi jumlah hak-hak dasar seperti menerjemahkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi ke dalam pembangunan manusia yang cepat dan merata. Namun demikian, keberhasilan ini sebagian besar dibiayai melalui belanja masyarakat, bukan belanja pemerintah. Krisis tersebut bukan hanya menyebabkan merosotnya pencapaian pembangunan manusia tetapi juga membawa pengaruh buruk pada tingkat kemiskinan. Sementara itu, selain pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia sangatlah penting dalam upaya mengurangi kemiskinan. Hal ini karena pendidikan dan kesehatan yang baik memungkinkan penduduk yang miskin untuk meningkatkan nilai asetnya mengingat hal terpenting dari mereka ialah tenaga mereka. Sehubungan dengan itu maka pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan dan kesehatan sangatlah penting.

Kemiskinan juga menghambat mereka untuk mengonsumsi nutrisi bergizi, dan dengan rendahnya tingkat pengetahuan yang mereka miliki, mereka kurang bisa memelihara lingkungan yang menyehatkan. Dari sudut pandang ekonomi, kesemuanya itu akan menghasilkan sumber daya manusia yang kurang berkualitas, atau dapat dikatakan memiliki tingkat produktivitas yang rendah. Hal ini juga berimbas pada terbatasnya upah/pendapatan yang dapat mereka peroleh.

Indeks pembangunan manusia (IPM), atau yang dikenal dengan sebutan *Human Development Index* (HDI) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur salah satu aspek penting yang berkaitan dengan kualitas dari hasil-hasil pembangunan ekonomi, yakni derajat perkembangan manusia. IPM adalah suatu

indeks komposisi yang didasarkan pada tiga indikator, yakni kesehatan, pendidikan yang dicapai, dan standar kehidupan. Jadi jelas bahwa 3 unsur ini sangat penting dalam menentukan tingkat kemampuan suatu propinsi untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia-nya. Ketiga unsur tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya, selain juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja, yang pada gilirannya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan kebijakan pemerintah. Jadi, IPM akan meningkat apabila ketiga unsur tersebut dapat ditingkatkan, dan nilai IPM yang tinggi menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi. Dengan kata lain terdapat korelasi positif antara nilai IPM dengan derajat keberhasilan pembangunan ekonomi.

Berdasarkan data BPS yang ada dari tahun 1996 sampai 2002, alokasi pengeluaran pemerintah provinsi masih lebih banyak untuk sektor-sektor diluar bidang pembangunan sosial. Kelompok sektor pendidikan dan kesehatan yang terdiri dari 6 sektor diatas tidak sampai setengah dari total pengeluaran pembangunan. Pada tahun 1996, rata-rata persentase investasi pembangunan sosial tersebut adalah 14,43%. Pada tahun tersebut persentase alokasi tertinggi pada Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sedangkan terendah adalah Propinsi Sulawesi Tenggara. Pada tahun-tahun berikutnya rata-rata persentase investasi pembangunan sosial ini meningkat yakni tahun 1999 menjadi 18,40% dan 22,12%. Tahun 1999 dan 2000 Propinsi Riau menduduki posisi pertama dalam persentase investasi sosial tersebut.

Propinsi-propinsi baru hasil pemekaran wilayah masih sangat rendah alokasi anggarannya untuk bidang pembangunan sosial tersebut.

Artinya, meskipun pemerintah sudah berusaha namun usahanya belum sebesar negara-negara tetangga. IPM mengacu pada tiga dimensi pada pembangunan manusia yakni kehidupan yang panjang dan sehat, kesempatan menikmati pendidikan dan hidup dengan standar yang layak (antara lain diukur dari daya beli dan pendapatan).

Melalui skripsi ini penulis tertarik untuk mengadakan penelitian menganalisis seberapa besar faktor-faktor yang permintaan tenaga kerja di Indonesia, sehingga dapat melihat seberapa besarnya mempengaruhi permintaan tenaga kerja di Indonesia, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Tenaga Kerja Di Indonesia (2006 – 2013)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Upah Minimum berpengaruh terhadap permintaan tenaga kerja di Indonesia
2. Apakah Jumlah Angkatan Kerja berpengaruh terhadap permintaan tenaga kerja di Indonesia ?

3. Apakah Index Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap permintaan tenaga kerja di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh upah minimum terhadap permintaan tenaga kerja di Indonesia.
2. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh angkatan kerja terhadap permintaan tenaga kerja di Indonesia.
3. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Index Pembangunan Manusia terhadap permintaan tenaga kerja di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis, diharapkan dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan tentang cara penulisan karya ilmiah serta memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai kondisi permintaan tenaga kerja di Indonesia.

2. Bagi Pemerintah, sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan dalam hal permintaan tenaga kerja di Indonesia terutama permasalahan pengangguran di Indonesia.
3. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi bagi penelitian yang akan dilakukan pada periode berikutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang masing – masing dijelaskan secara singkat.

BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

1. Kajian Pustaka

Berisi tentang pendokumentasian dan pengkajian hasil dari penelitian – penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya pada topik yang sama. Hal ini penting dilakukan untuk menunjukkan bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki arti penting sehingga diketahui kontribusi penelitian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan maupun empiris.

2. Landasan Teori

Berisi tentang teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang akan diteliti. Landasan teori ini harus memberikan diskusi yang lengkap mengenai hubungan antar variabel yang terlibat.

3. Hipotesis Penelitian

Dipandang sebagai jawaban sementara atas rumusan masalah, sehingga hipotesis yang disusun merupakan pernyataan yang menjawab pertanyaan pada rumusan masalah.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, identifikasi, perumusan model analisis, atau metode analisis.

BAB IV. HASIL, ANALISIS DATA PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi data, pengujian hipotesis atas hipotesis yang dibuat, pembahasan, serta penelitian dari pengujian tersebut.

BAB V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh pelaksanaan penelitian, keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya.